

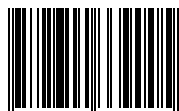


Buletin Parlementaria

Nomor 1113/III/VII/2020 • Juli 2020



DPR Setujui RUU Perppu Pilkada Serentak Jadi UU



9 772614 339005



7 Industri Tanaman
Herbal Harus jadi
Prioritas Pemerintah



20 Revisi UU SKN
untuk Tingkatkan
Prestasi Semua Cabor



Pimpinan DPR RI menyaksikan penyerahan laporan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengenai pembahasan RUU tentang Perppu 2 Tahun 2020 kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto: Nalfurji/MAN

DPR Setujui RUU Perppu Pilkada Serentak Jadi UU

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU terhadap penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam kesempatan tersebut, seluruh Anggota Legislatif yang hadir baik fisik maupun virtual menyetujui RUU tentang Pilkada Serentak itu untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Kami menanyakan kepada setiap Fraksi, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7). Serempak seluruh Anggota Dewan menjawab “Setuju”.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan, dengan disetujuinya RUU tentang Perppu 2 Tahun 2020 menjadi UU ini, Komisi II DPR RI berharap semua pihak yang berkepentingan dengan Pilkada serentak, khususnya pihak penyelenggara, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP beserta seluruh jajaran Pemerintah menurut tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memaksimalkan seluruh potensi yang dimilikinya demi terlaksananya Pilkada pada Desember

2020 dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM yang bersama-sama dengan Komisi II DPR RI telah melakukan pembahasan RUU ini dengan rasa kebersamaan dan dalam suasana yang demokratis. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pembahasan Rancangan Undang-Undang ini,” ucap Doli.

Seperti diketahui, Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah telah menyetujui RUU tentang Perppu Pilkada serentak untuk menjadi Undang-Undang. Pengambilan keputusan dilaksanakan di ruang rapat Komisi II DPR RI pada tanggal 30 Juni 2020. Hadir mewakili Pemerintah pada saat itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. ■ dep/es

UU MLA Indonesia-Swiss Modal Perkuat Pemberantasan Korupsi

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani berharap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana atau *Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters* antara Pemerintah Indonesia dengan Konfederasi Swiss menjadi Undang-Undang (UU) bisa menjadi pijakan untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi.

Menurutnya, UU ini sangat menguntungkan, karena akhirnya Indonesia bisa meminta bantuan Pemerintah Swiss mengusut hasil kejahatan WNI yang disimpan di Swiss. “Terutama dalam pengejaran aset-aset terpidana kasus korupsi dan praktik pencucian uang. Sehingga proses *recovery asset* dari hasil tindak

pidana bisa dilakukan,” tegas Puan usai mengikuti secara virtual Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).

Tak hanya itu, Puan juga optimistis kejahatan perpajakan bisa ditanggulangi dengan pengesahan RUU itu. “Jadi, nanti tidak perlu lagi ada amnesti pajak. Karena, UU ini bisa digunakan untuk memerangi kejahatan perpajakan dan penghindaran pajak yang selama ini menjadi PR kita,” imbuh Puan.

Politisi PDI-Perjuangan ini menggambarkan bahwa UU MLA antara RI – Swiss terdiri dari 39 pasal. Ia menjelaskan, pasal-pasal itu mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, membantu menghadirkan saksi, meminta dokumen, rekaman dan bukti, penanganan benda dan aset untuk tujuan penyitaan atau pengembalian aset.

“Juga mengatur penyediaan informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, mencari keberadaan seseorang dan asetnya, mencari lokasi dan data diri seseorang serta asetnya. Termasuk, memeriksa situs internet yang berkaitan dengan orang tersebut. Serta, menyediakan bantuan lain sesuai perjanjian yang tidak berlawanan dengan hukum di negara yang diminta bantuan,” ujarnya.

Yang istimewa, menurut Puan, UU ini bersifat retroaktif atau berlaku surut. “Artinya pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dan Swiss dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan. Hal ini 4 sangat penting guna menjangkau kejahatan yang dilakukan sebelum perjanjian ini terwujud,” ucap legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V itu. ■ er/sf



Ketua DPR Dr. (H.C.) RI Puan Maharani. Foto: Kresno/MAN



DPR Setujui RUU Perppu Pilkada Serentak Jadi UU

7 Indukht Tanaman
Harahil Harahil jadi
Prioritas Penerimaan

20 Revisi 181 SKN
untuk Tingkatkan
Prevalensi Serum Cabor

PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Armanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Purntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Armanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiat, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie.

ANALIS MEDIA

Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyawati

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natallio, Fajar Suryanto

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Sartomo, S.S., M.Si (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

FOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Sugiyanto, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Paripurna DPR Resmikan Lima Anggota BSBI



Pimpinan DPR RI menerima laporan pembahasan calon Anggota BSBI dari Pimpinan Komisi XI DPR RI. Foto: Arief/MAN

Rapat Paripurna DPR RI menetapkan lima calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). Sebelum ditetapkan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara melaporkan pembahasan pencalonan Anggota BSBI di hadapan Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7). Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden melalui surat Nomor R-17/Pres/03/2020 tertanggal 24 Maret 2020 telah mengajukan 11 nama calon Ketua dan Anggota BSBI untuk masa jabatan 3 tahun.

“Komisi XI DPR RI secara musyawarah mufakat memutuskan memilih lima nama calon Anggota BSBI Periode 2020-2023, untuk disahkan dalam Rapat Paripurna hari ini. Diantaranya yaitu Muhammad Edhie

Purnawan, R. Nunung Nuryartono, Muhammad Nawir Messi, Mohammad Khusaini, dan Nury Effendi,” kata Amir, yang kemudian menyerahkan hasil pembahasan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Selaku Pimpinan Rapat, Dasco selanjutnya menanyakan persetujuan seluruh Anggota Dewan yang hadir. “Apakah laporan Komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Anggota BSBI dapat disetujui untuk ditetapkan?” tanya Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) tersebut. “Setuju,” jawab Anggota Dewan secara singkat, yang diikuti dengan ketukan palu pengesahan.

Sebagai anggota terpilih, kelimanya akan bertugas melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja BI, yang utamanya dalam meningkatkan

akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas. Selain itu, Anggota BSBI terpilih juga nantinya akan membantu DPR RI dalam memberikan gambaran kebijakan yang diambil. Sehingga, DPR RI memiliki instrumen yang tepat dalam mengawasi berbagai tugas BI agar menjadi lebih baik.

Kelima calon Anggota BSBI terpilih itu berasal dari kalangan praktisi ekonomi dan *civitas academica*. Diantaranya, Muhammad Edhie Purnawan (Dosen Fakultas Ekonomi UGM, R. Nunung Nuryanto (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB), Muhammad Nawir Messi (Anggota Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha), Mohammad Khusaini (Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya), dan Nury Effendi (Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran). ■ alw/sf

Percepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melaporkan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Berdasarkan Undang-Undang (UU) MD3 dan Tata Tertib DPR, Banggar bertugas untuk melakukan pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN, dan harus selesai paling lambat pada bulan Juli. Menindaklanjuti UU dan Tatib tersebut, Banggar telah melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 Juni - 9 Juli 2020 lalu.

Laporan tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said di mimbar ruang Rapat Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).

Adapun, tema RKP tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.

“RKP Tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro khususnya pemulihan perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata,” paparnya

Adapun target dan indikator pembangunan tahun 2021 yang menjadi kesepakatan DPR dengan Pemerintah tentang target dan indikator pembangunan. Pertama, Pengangguran 7,7 - 9,1 persen. Kedua, Angka Kemiskinan 9,2 - 9,7 persen. Ketiga, Gini Rasio 0,377 - 0,379 (indeks). Keempat, Indeks Pembangunan Manusia dengan perhitungan yang baru 72,78-72,95.

Kelima, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29 persen di 2030, 23,55-24,05 persen. Kenam, Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan 4,7-5,5 persen. Ketujuh, Nilai devisa pariwisata 4,8-8,5 miliar dollar Amerika Serikat (AS). Kedelapan, Nilai Tukar Petani (NTP) 102 -104 sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 102 -104.

Muhidin menyampaikan dalam pembahasan tersebut, Komisi VII dan Komisi XI DPR RI memberikan rekomendasi kisaran asumsi dasar tahun 2021. Dan Komisi-Komisi juga melakukan pembahasan pagu indikatif Tahun 2021 dan RKP Tahun 2021 dengan mitra kerjanya pada tanggal 19-29 Juni 2020 untuk kemudian disampaikan kepada Banggar. Agar pembahasan lebih efektif, maka disepakati untuk membentuk empat Panitia Kerja (Panja).

Pertama, Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan; kedua, Panja RKP dan Prioritas Anggaran; ketiga, Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat; keempat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan telah melakukan rapat pada tanggal 24 Juni - 2 Juli 2020. Sekaligus dibentuk Tim Perumus Laporan Panja dari masing-masing Panja dan telah melakukan pembahasan pada tanggal 6-7 Juli 2020.

Muhidin juga melaporkan, bahwa dalam Rapat Kerja tanggal 9 Juli 2020, seluruh laporan-laporan panja tersebut telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Badan Anggaran dengan pemerintah dalam rangka pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021 dan RKP Tahun 2021 dan menjadi bahan dasar bagi Pemerintah dalam menyusun RUU APBN TA 2021 beserta Nota Keuangannya. ■ eko/es



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima laporan hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2021 dari Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said. Foto: Jaka/MAN

DPR Dorong Pemerintah Tingkatkan Peran Indonesia di Indo-Pasifik

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin mendorong Pemerintah meningkatkan peran Indonesia untuk dapat menciptakan perdamaian di tengah tensi geopolitik sedang meningkat di perbatasan China-India, Laut China Selatan, termasuk isu Hong Kong dan Taiwan. Dimana, wilayah Indo-Pasifik ini telah menjadi teater konflik baru dunia.

Saat ini, tensi militer juga meningkat tinggi dengan masuknya angkatan militer Amerika Serikat dalam hal *Freedom of Navigation*. Gerakan militer China-Amerika sangat dikhawatirkan bisa menimbulkan perang konvensional di lautan, dan Indonesia memiliki kepentingan bersama-sama dengan negara-negara ASEAN lainnya.

"Indonesia memiliki pengalaman dan kepentingan dalam menjunjung tinggi perdamaian serta memunculkan solusi-solusi terbaik. Di masa lalu telah dibuktikan dalam peranan Indonesia di Gerakan Non-Blok, dan KTT Asia-Afrika. Di masa kini melalui "*ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*" yang digagas oleh Indonesia," kata Azis dalam siaran pers kepada **Parlementaria**, Kamis (9/9).

Azis menilai, gagasan Indonesia terkait wilayah Indo-Pasifik perlu ditingkatkan dan di-institusionalisasikan secara politik guna membangun kesepahaman perdamaian regional sesuai dengan asas sentralitas ASEAN. Inilah kesempatan baik bagi Indonesia sesuai dengan filsafat politik luar negeri bebas aktif untuk turut andil dalam membangun perdamaian dunia. "Peran kepemimpinan Indonesia ini yang dinanti



Wakil Ketua DPR RI Korpolkam M. Azis Syamsuddin berdialog dengan Wakil Ketua DPR RI Korekku Sumfi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel. Foto: Kresno/MAN

Dunia, agar wilayah ASEAN secara khusus serta Indo-Pasifik secara umum mampu terhindar dari polarisasi maupun perang dingin abad ke-21," ujarnya.

Azis menambahkan, di tengah pandemi Covid-19 sudah sepatutnya masing-masing pihak mengutamakan kerja sama yang lebih erat dalam menanggulangi pandemi serta berkolaborasi agar ekonomi global bisa bangkit kembali. "Konflik di wilayah Indo-Pasifik harus segera dihentikan, Kita perlu duduk bersama dalam mewujudkan langkah-langkah Geostrategis dan Geo Ekonomi wilayah Indo-Pasifik," sambungnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, sudah tidak zamannya lagi teori perang konvensional. Dunia sudah harus mampu dewasa,

belajar dari pengalaman masa lalu. Menurutnya, tantangan perbedaan harus diselesaikan melalui dialog dan saling menghormati serta menggunakan instrumen hukum-hukum Internasional dalam menyelesaikan perbedaan.

Ke depan, Azis mengharapkan agar Indonesia sebagai pihak netral harus aktif dalam mempersatukan perbedaan-perbedaan politik berbagai negara ini dalam suatu kerangka inklusif demi kepentingan perdamaian dunia sesuai dengan norma-norma demokrasi dan keadilan sosial yang menjadi cita-cita proklamasi. Dimana, sebagai negara yang berdaulat harus menolak segala bentuk klaim wilayah baik lautan maupun daratan yang tidak sesuai dengan Norma-Norma Hukum Internasional. ■ ann/es

Industri Tanaman Herbal Harus Jadi **Prioritas** Pemerintah

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mengapresiasi pemerintah, lembaga, dan semua pihak yang kompeten melakukan kajian produk obat herbal untuk melawan Virus Covid-19. Menurutnya, upaya itu bukan saja memberi harapan masyarakat agar bisa segera memasuki kehidupan normal, namun juga memberikan peluang besar membangun industri obat herbal berbasis kekayaan sumber daya tanaman obat Indonesia.

“Prospek industri berbasis tanaman herbal ini harus mendapat prioritas kebijakan Pemerintah. Kemampuan Balitbang dari lembaga terkait, baik pemerintah maupun swasta harus didukung sepenuhnya,” ujar Gobel, dalam keterangan persnya kepada **Parlementaria** di Jakarta, Selasa (14/7). Hal ini diungkapkannya menyusul polemik kalung antivirus Corona berbasis *eucalyptus* (minyak kayu putih) yang dikembangkan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian.

Terlepas dari hal itu, ia tetap meyakini kemampuan kajian dan penelitian para ahli farmasi Indonesia. “Kajian mereka terbukti dan terus berkembang dari tahun ke tahun. Bahkan hasil penelitian itu berhasil dikembangkan dan diproduksi secara industri dan mampu membuktikan produknya menguasai pasar domestik dan ekspor,” ungkapnya.

Ditambahkannya, pihaknya pernah membuktikan besarnya prospek obat herbal di pasar internasional, yakni saat pelaku usaha dan industri Indonesia melakukan pameran di Rusia. Respon masyarakat Eropa, khususnya Rusia

begitu besar, sehingga produk yang dibawa di arena pameran tersebut habis terjual. Bahkan lebih dari itu terjadi pembukaan kontrak pembelian oleh beberapa pengusaha besar saat itu.

“Produk itu memang tetap harus dibuktikan, diuji, dan dikembangkan lebih jauh efektivitasnya untuk kepentingan yang lebih besar. Namun dalam kondisi saat ini, kita berkejaran dengan waktu untuk menurunkan angka kematian warga dan yang terinfeksi sebelum ditemukannya vaksin virus Corona,” tambahnya.

Melihat prospek pasar obat herbal di dunia internasional yang sangat bagus, terlebih lagi di masa datang, dimana gaya hidup ramah lingkungan seperti penggunaan obat herbal akan semakin berkembang. Maka ia menilai langkah yang dilakukan oleh Balitbangtan Kementan perlu mendapat penghargaan yang tinggi.

Ia mengutip data Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT)

Kementerian Perindustrian, Indonesia mempunyai sekitar 30.000 varietas tanaman yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi berbagai formula obat herbal oleh pelaku industri jamu dan obat tradisional. Pengembangan ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk mendukung perekonomian nasional.

Saat ini ada sekitar 1.200 pelaku industri jamu, dari jumlah itu ada sekitar 129 usaha yang masuk kategori industri. Sisanya merupakan industri berskala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terklasifikasi menjadi Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).

“Prospek industri berbasis tanaman herbal ini harus mendapat prioritas kebijakan Pemerintah. Bahkan, kemampuan Balitbang dari lembaga terkait, baik Pemerintah maupun swasta harus didukung sepenuhnya,” pungkas politisi Partai NasDem itu. ■ **ayu/es**



Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel. Foto: Jaka/MAN

Sufmi Dasco Apresiasi Wacana Pemangkasan Lembaga Negara

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku)

Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi semangat Presiden Joko Widodo yang akan memangkas birokrasi dengan harapan kinerja lembaga negara ke depannya lebih efektif lagi. Tak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi rencananya akan membubarkan 18 lembaga negara sebagai upaya penyederhanaan dan memudahkan proses administrasi agar tidak tumpang tindih dengan lembaga lainnya.

Kepada para wartawan di selasar Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta (14/7), Dasco mengaku, dirinya belum bisa berkomentar lebih banyak terkait wacana itu. Karena belum mengetahui secara detail, satu per satu, 18 lembaga negara yang akan dibubarkan oleh Presiden Jokowi dalam waktu dekat ini.

“Namun, memang perlu didetailkan dan dibahas nanti mana saja lembaga-lembaga yang perlu dibubarkan. Kita harus lihat nanti efek baliknya terhadap tatanan negara dan efek-efek lain yang tentunya akan terjadi setelahnya,” pesan politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Dasco menambahkan, perlu dilihat secara objektif mana saja lembaga negara yang kinerjanya lambat, mana yang perlu dibubarkan, dan mana yang tidak perlu. “Biar nanti ada tim ahli yang memberikan masukan kepada Presiden, mana saja lembaga negara yang perlu dan tidak perlu. Termasuk juga DPR akan memberikan pendapatnya apabila memang sudah kita tahu, yang diwacanakan itu lembaga-lembaga mana saja,” pungkasnya. ■ es

”

BIAR NANTI ADA TIM AHLI YANG MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA PRESIDEN, MANA SAJA LEMBAGA NEGARA YANG PERLU DAN TIDAK PERLU. TERMASUK JUGA DPR AKAN MEMBERIKAN PENDAPATNYA APABILA MEMANG SUDAH KITA TAHU, YANG DIWACANAKAN ITU LEMBAGA-LEMBAGA MANA SAJA

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Foto: Yoga/MAN



Komisi I Minta Kluster Secapa AD Ditangani Serius



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya. Foto: Naifuroji/MAN

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya meminta kasus kluster Covid-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) Bandung, Jawa Barat dan kemudian menyusul di Pusdik Polisi Militer AD Cimahi harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Khususnya, imbuh Riefky, pihak/pejabat yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan TNI/TNI AD.

Lebih lanjut, menurut Riefky dalam siaran pers kepada **Parlementaria**, Sabtu (11/7), perlu kebijakan yang komprehensif terkait penanganan kasus tersebut agar tidak mengganggu performa TNI secara keseluruhan, terutama sebagai salah satu institusi terdepan dalam membantu Pemerintah menanggulangi Covid-19.

“Peran TNI dalam melaksanakan tugas perbantuan kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19, baik di level

pemerintah pusat maupun daerah harus terus dijaga dan ditingkatkan, setidaknya sampai tersedianya vaksin Covid-19 di Tanah Air,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Riefky menyatakan zona merah di Secapa AD dan Pusdikpom AD merupakan “alarm” agar kasus serupa tidak terjadi lagi di Lembaga Pendidikan (Lemdik) TNI lainnya, terutama di Lemdik Perwira Pertama (Dikma dan Dikjur/Sarcab) maupun Perwira Menengah (Diklapa dan Sesko) sebagai kader Pemimpin TNI masa depan.

“Jika di Lemdik Sipil metode pembelajaran daring saat ini menjadi prioritas pada masa pandemi, maka seyogyanya Lemdik TNI juga perlu beradaptasi dengan metode daring tersebut. Meskipun, tentunya sulit menerapkan metode tersebut secara drastis di Lemdik TNI,” ujar Riefky.

Namun, kata dia, harus disadari bahwa metode pembelajaran daring dengan “*video conference*” untuk

menghubungkan peserta didik yang berada di luar area pendidikan dengan tenaga akademik yang berada di Lemdik sementara ini merupakan satu-satunya alternatif terbaik dalam rangka proses belajar mengajar.

“Metode ini sesuai dengan protokol kesehatan yang bertujuan untuk menekan intensitas interaksi fisik secara langsung serta meminimalkan berkumpulnya personel dalam jumlah besar,” ucap legislator dapil Aceh I itu.

Secara simultan, ia mengatakan selain dilakukan evaluasi internal oleh TNI, seyogyanya pemerintah daerah setempat ikut menelusuri terhadap adanya individu-individu masyarakat yang pernah berada atau berinteraksi langsung dengan pasien dalam pengawasan (PDP) atau orang dalam pemantauan (ODP) yang berasal dari kedua Lemdik Militer tersebut.

“Untuk mencegah jangan sampai kluster Secapa AD dan Pusdikpom AD ini menjadi sumber penyebaran wabah baru di Bandung dan juga Jawa Barat atau bahkan ke wilayah provinsi lainnya mengingat para peserta didik kedua Lemdik tersebut berasal dari seluruh Indonesia,” kata Riefky.

Sebelumnya, kluster Secapa AD membuat penambahan kasus Covid-19 di Jawa Barat melonjak drastis. Diketahui, ada 1.262 kasus di Secapa AD, 17 orang diisolasi di rumah sakit. Sedangkan sisanya, 1.245 kasus merupakan Orang Tanpa Gejala (OTG).

Sedangkan untuk di Pusdikpom, ada 99 kasus merupakan OTG, yang terdiri dari siswa 74 personel dan organik 25 personel. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (GTPP Jabar) masih menyelidiki dari sisi epidemiologis terkait sumber penularan di dua instansi militer tersebut. ■ ann/sf

Komisi II dan Kementerian ATR BPN Bentuk Tim Kerja Penyelesaian Sengketa Tanah

Pada tanggal 23 Juni 2020 Komisi II DPR RI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sepakat untuk membentuk tim bersama untuk menyelesaikan konflik dan sengketa lahan. Sesuai dengan hasil keputusan rapat internal Komisi II DPR RI tanggal 2 Juli 2020, Komisi II DPR RI telah membentuk tim kerja terkait dengan penyelesaian permasalahan kasus-kasus pertanahan dan tata ruang.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian ATR/BPN guna membahas pembentukan tim kerja terkait penyelesaian permasalahan kasus-kasus pertanahan dan tata ruang, serta membicarakan mekanisme kerja tim kerja tersebut di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7).

“Selama masa sidang pertama setelah dilantik sampai hari ini, Komisi II banyak sekali mendapatkan pengaduan terkait dengan soal sengketa, baik pertanahan maupun tata ruang. Baik bersifat perorangan maupun juga yang terkait dengan badan hukum perusahaan maupun kelompok. Oleh karenanya, Komisi II sebagai bagian dari presentasi masyarakat perlu juga menyampaikan dan menindaklanjuti terkait dengan laporan-laporan dan aspirasi yang dikirimkan kepada Komisi II,” ucap Saan saat rapat.

Terkait soal laporan dan aspirasi tersebut, tambah Saan, Komisi II sudah mencoba memetakannya. Sebab tidak semua yang berkaitan dengan aduan itu bisa begitu saja direpson. “Kita akan

”

KITA AKAN SELEKTIF DAN SEDETAIL MUNGKIN UNTUK BISA MEMPROSES ADUAN DAN ASPIRASI

selektif dan sedetail mungkin untuk bisa memproses aduan dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat di seluruh Indonesia ini,” tuturnya.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan, Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian ATR/BPN akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa objektif dan tidak ada *conflict of interest* terkait dengan penanganan persoalan pertanahan maupun tata ruang.

“Kita akan petakan bersama-sama, mana yang bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian ATR/BPN. Selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019, Kementerian ATR/BPN juga banyak menerima aduan terkait sengketa atau konflik pertanahan dan tata ruang. Semua akan kita bahas dan selesaikan semata-mata untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara,” tutup legislator dapil Jawa Barat VII itu. ■ dep/es



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa. Foto: Gerald/MAN

Bahas Kasus Djoko Tjandra, Komisi III akan Gelar Ratgab

Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mengusulkan Komisi III DPR RI menggelar rapat gabungan (Ratgab) dengan institusi penegak hukum lain yang bersinggungan dengan kasus Djoko Tjandra. Rapat gabungan yang direncanakan ini bertujuan untuk mengefektifkan pembahasan kasus tersebut. Institusi penegak hukum lain yang akan diundang antara lain, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Ditjen Imigrasi.

“Jadi dengan demikian, kesimpulan rapat ini, kita mengundang, memanggil aparat penegak hukum lainnya agar kasus Djoko Tjandra menjadi terang benderang,” papar Herman saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengenai evaluasi layanan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/7).

Senada dengan usulan Pimpinan Rapat, Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding mengungkapkan persetujuannya, untuk menyebutkan institusi yang berkepentingan guna dilibatkan dalam rapat gabungan. “Pada prinsipnya setuju, mengundang aparat penegak hukum, untuk lebih efektifnya, lebih bagus kita rapat gabungan. Jadi Kepolisian, Kejaksaan, sekaligus dengan Menkumham, (dan) Imigrasi di dalamnya. Supaya tidak melempar tanggung jawab,” jelas politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini.

Sebelumnya Herman mengatakan rapat dengan Dirjen Imigrasi ini sudah cukup efektif untuk membahas



Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery (kanan). Foto: Oji/AN

”

**SEBAGAI APARAT
PENEGAK HUKUM,
TIDAK HANYA
DIRJEN IMIGRASI
YANG HARUS
DITANYAKAN,
MASIH ADA APARAT
PENEGAK HUKUM
LAINNYA**

hal-hal teknis. Namun dia menyadari, Dirjen Imigrasi hanya pelaksana aturan, pengambilan kebijakan tetap ada di tangan puncak pimpinan kementerian. Herman mengatakan, sebagai aparat penegak hukum, tidak hanya Dirjen Imigrasi yang harus ditanyakan, masih ada aparat penegak hukum lainnya.

“Dalam rapat kali ini saya lihat sudah cukup efektif untuk kita mendapatkan masukan-masukan teknis dari Dirjen Imigrasi, kenapa ini semua bisa terjadi dalam ranah konteks paspor dan keluar masuknya orang, karena itu tupoksinya imigrasi,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu. ■ eko/sf

Legislator Minta KLHK Sinergi Bangun NTT

Anggota Komisi IV DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar untuk bersinergi dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) guna meningkatkan program pariwisata yang ada di sana. Karena program Gubernur NTT Viktor Laiskodat saat ini lebih banyak di bidang pariwisata, sehingga erat berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan.

“Kebetulan program Pak Gubernur NTT itu lebih besar di bidang pariwisata. Dan sebelum pandemi Covid-19, Pak Presiden menyebut bahwa NTT termasuk destinasi wisata prioritas dan saya memohon Ibu Menteri (LHK) karena mempunyai lahan kehutanan yang bisa menjadi objek pariwisata untuk bisa mendukung penuh (program) Gubernur NTT ini,” ujar Julie saat mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri LHK Siti Nurbaya beserta jajaran, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).

Politisi Partai NasDem yang juga Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTT ini mengakui bahwa NTT memiliki potensi yang besar jika alam dan lingkungannya dikelola secara baik. Karena itu sinergi antara KLHK dengan seluruh unsur pemangku kepentingan di NTT sangat diperlukan.

Anggota Komisi IV DPR RI
Julie Sutrisno Laiskodat.
Foto: Rumi/MAN



SAYA BERMIMPI BISA BERKOLABORASI DENGAN IBU (MENTERI LHK) DAN MOHON DUKUNGANNYA UNTUK DEKRANASDA BISA MENJADIKAN ITU PARIWISATA SEBAGAI WILAYAH YANG POHONNYA ITU BISA KITA PETIK

“Saya adalah Ketua Dekranasda NTT. Kami mempunyai program adalah menuju ekowisata dan agrowisata. Contohnya misalnya kami gunakan tenun yang tiap hari dipakai mempunyai budaya yang luar biasa dan zaman dulu itu tenun dibuatnya itu dari kapas, tapi saat ini pohon kapas itu sudah hampir punah,” sambung Julie.

Legislator daerah pemilihan (dapil) NTT I itu pun berharap Dekranasda NTT bisa kolaborasi dengan KLHK dalam menciptakan lahan pariwisata yang memanfaatkan potensinya. “Saya bermimpi bisa berkolaborasi dengan ibu (Menteri LHK) dan mohon dukungannya untuk Dekranasda bisa menjadikan itu pariwisata sebagai wilayah yang pohonnya itu bisa kita petik,” sambungnya.

Menurut Julie, pemanfaatan pariwisata juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Sehingga ia pun sangat berkeinginan untuk membantu Pemerintah dalam sektor itu. “Saya ingin Dekranasda ini bisa membantu pemerintah di bidang pariwisatanya. Sehingga masyarakat bisa *enjoy* dengan alam, tapi juga ada nilai ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya,” pungkas Julie. ■ hs/sf

Pembangunan Infrastruktur Riau Harus Ditingkatkan



Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat. Foto: Runi/MAN

Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyatakan pemulihan ekonomi, industri dan pariwisata harus terus menjadi fokus arah kebijakan pembangunan nasional Provinsi Riau, khususnya untuk tahun 2021 mendatang. Terutama, tak kalah pentingnya dalam peningkatan sektor pembangunan infrastruktur di Riau. Mengingat, ungkap Syahrul, membangun Riau tentunya sama dengan membangun Indonesia.

Terlebih, Riau menjadi jendela

bagi hubungan Indonesia dengan luar negeri khususnya Malaysia, Singapura dan Thailand. Pemaparan tersebut disampaikan Syahrul saat RDPU Komisi V DPR RI dengan Gubernur Provinsi Riau Syamsuar yang diselenggarakan secara virtual dan fisik di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7).

“Sama-sama kita kawal infrastruktur di Riau. Karena, membangun Riau sama dengan membangun Indonesia. Kami juga sudah melihat kondisi pembangunan jalan tol yang

”

SAMA-SAMA KITA KAWAL INFRASTRUKTUR DI RIAU. KARENA, MEMBANGUN RIAU SAMA DENGAN MEMBANGUN INDONESIA. KAMI JUGA SUDAH MELIHAT KONDISI PEMBANGUNAN JALAN TOL YANG MENGHUBUNGKAN PEKANBARU-DUMAI

menghubungkan Pekanbaru-Dumai. Serta, mengunjungi juga Roro Dumai yang direncanakan Dumai-Malaka yang menjadi pintu gerbang bagi hubungan internasional,” ujar Syahrul.

Menurut legislator dapil Riau II itu, jika arah kebijakan pembangunan nasional tersebut betul-betul dapat tercipta dengan sinergi pembangunannya bersama Kementerian terkait, maka akan menimbulkan dampak positif *multiplier effect* bagi perekonomian Indonesia pada umumnya, dan perekonomian Riau pada khususnya.

“Arahnya ke sana, mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan dan kita eksekusi di tahun 2021 dengan bantuan dari Komisi V DPR RI. Insya Allah, pembangunan infrastruktur di Riau akan meningkat untuk tahun-tahun berikutnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena memang, hampir di setiap rapat dengar pendapat dengan Kementerian kita bicara tentang Riau,” pungkas politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu. ■ pun/sf



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima dengan Direksi PT. Pos Indonesia. Foto: Erlangga/MAN

Komisi VI Komitmen Bahas RUU Sistem Perposan dan Logistik Nasional

Komisi VI DPR RI berkomitmen akan segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional yang memang telah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2020, dalam rangka mendukung kinerja PT. Pos Indonesia yang mendapat tugas khusus dari pemerintah guna memastikan bantuan sosial (bansos) dari pusat terdistribusi dengan baik kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima kepada *Parlementaria* usai memimpin tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kantor Pusat PT. Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/7). Menurutnya tugas Pos Indonesia butuh dijamin Undang-Undang yang lebih kuat yang lebih mengikuti perkembangan zaman.

“Jadi kita harus memberikan

dukungan politik bahwa PT. Pos ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan logistik nasional. Terutama logistik yang terkait hajat hidup orang banyak. Harus benar-benar peran negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kepada rakyat itu perlu adanya BUMN yang cukup kuat dan mempunyai infrastruktur yang menjangkau dalam wilayah NKRI,” ujarnya usai pertemuan.

Selama ini dikatakan Aria, bahwa Pos Indonesia rela merugi untuk memenuhi tugas politiknya yakni menjamin keamanan ketersediaan logistik di daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan). Namun politisi PDI-Perjuangan ini tetap meyakini bahwa perusahaan yang telah eksis sejak tahun 1746 ini akan bisa bertahan dengan menciptakan inovasi dan didukung UU baru.

“Saya tetap yakin dengan asetnya yang besar dengan infrastruktur melimpah akan kita beri payung Undang-Undang pos logistik nasional yang

merupakan UU inisiatif prioritas Komisi VI. Kita berharap PT. Pos Indonesia akan menjadi BUMN yang memiliki tugas untuk menjadi konektivitas antar Provinsi antar daerah guna bagaimana Indonesia bisa menjadi satu kesatuan ekonomi terutama hal-hal yang terkait dengan barang kebutuhan pokok,” imbuhnya.

Politisi dapil Jawa Tengah V ini mengatakan akan segera memanggil direksi dari PT. Pos Indonesia untuk pembahasan awal RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional serta membahas segala kendala yang timbul akibat pandemi juga roadmap penanganannya.

“Kita akan undang (Pos Indonesia) di masa persidangan ke depan bagaimana *roadmap* dampak pandemi I, pandemi II ini yang kita harapkan jangan sampai urusan masalah logistik ini atau urusan bantuan sosial ini terkendala karena ada ego sektoral di masing masing BUMN,” tukas Aria. ■ *er/sf*

PT. Pindad akan Ekspor Ventilator

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan, Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT. Pindad (Persero), untuk mengecek secara langsung perkembangan produksi ventilator. Ini merupakan salah satu produk inovasi dari Pindad dalam rangka membantu Pemerintah menangani pandemi virus Corona (Covid-19). Tak hanya itu, beberapa negara sudah mengajukan permintaan ventilator kepada Pindad.

“Menteri BUMN melaporkan bahwa PT Pindad ikut membantu pemerintah dalam menangani Covid-19. Dengan secara khusus memproduksi alat-alat kesehatan seperti ventilator, respirator. Nah kebetulan juga kami melihat itu sudah mulai diproduksi, bahkan rencananya akan masuk pasar ekspor,” terang Martin

usai pertemuan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/7).

Politisi Partai NasDem ini menyambut gembira atas inovasi yang dikembangkan oleh jajaran Pindad. Meskipun terus berinovasi dengan produk-produk yang inovatif, Martin berharap agar Pindad tidak pernah melupakan *core business*-nya yaitu menjadi industri strategis yang dapat diandalkan dalam mendukung pertahanan dan keamanan Indonesia.

Ke depan, ia menekankan perlu adanya sinergi antar BUMN supaya bisa lebih memaksimalkan potensi dari PT Pindad. “Karena potensi yang dimiliki PT Pindad ini lumayan besar di hulunya, sehingga perlu juga dibantu oleh BUMN lain. Sehingga kita bisa mengurangi komponen impor, kita bisa lebih menjadi tuan di negeri sendiri untuk pertahanan kita,” tukas legislator dapil Sumut II itu.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menjelaskan, PT Pindad merupakan salah satu industri strategis yang memiliki sumber daya yang mumpuni baik itu peralatan maupun SDM-nya. Seperti saat pandemi Covid-19 saat ini, PT Pindad bertransformasi melakukan penelitian untuk membuat ventilator dan sudah lulus uji teknis dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) dan uji klinis dari Kementerian Kesehatan RI.

“Ventilator yang dibuat ini sudah lolos BPFK dan uji klinis, sehingga dalam waktu dekat kita akan bertemu Menteri Pertahanan untuk menyampaikan kepada beliau. Mungkin akan ada penyerahan ventilator-ventilator produk PT Pindad ini ke RS Angkatan Darat,” tandasnya.

Terkait kelangsungan produksi ventilator ke depannya, Abraham mengatakan akan melihat potensi permintaan pasar. “Kalau kebutuhan ini tetap tumbuh dan berkembang serta potensi marketnya bisa dikatakan besar, maka kita akan meneruskan penelitian-penelitian dan pembuatan-pembuatan produk alat kesehatan lainnya selain ventilator,” pungkas Abraham. ■ es



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT. Pindad. Foto: Erman/MAN

Tinjau Kesiapan Vaksin Covid-19, Komisi VI Kunjungi Bio Farma

Semakin meluasnya sebaran virus Corona (Covid-19) memaksa semua pihak untuk bekerja bersama-sama menemukan vaksin Covid-19. Seiring menunggu keberhasilan temuan tersebut, upaya deteksi melalui *rapid test* dan *swab test* (Polymerase Chain Reaction/PCR) juga terus dilakukan guna menghentikan sebarannya. Guna memastikan kesiapan tersebut, Komisi VI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Bio Farma (Persero) selaku *holding* BUMN yang bergerak di sektor farmasi.

“Kami datang ke Bio Farma untuk melihat kesiapan-kesiapan itu termasuk kesiapan vaksinnya sendiri, dan juga mereka saat ini sedang memproduksi alat tes kit PCR, yang per akhir Mei 2020 mereka bisa memproduksi 100 ribu *test* (kit), jadi kita mau cek juga bagaimana kesiapannya di lapangan dan kesiapan untuk memproduksi lebih lanjut,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan jajaran direksi PT. Bio Farma (Persero), di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/7).

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Golkar ini memandang pemulihan kesehatan masyarakat (*public health recovery*) harus dituntaskan jika menginginkan ekonomi untuk segera bangkit. Untuk itu, ia mendorong segera dirampungkannya uji klinis dari vaksin Covid-19 yang saat ini sedang dikembangkan oleh Bio Farma, Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan, LIPI, Balai Besar Penelitian Veteriner (BB Litvet), dan sejumlah perguruan tinggi yang bergerak di bawah pimpinan Lembaga Biologi Molekular Eijkman.

“Vaksin ini kan harus segera dilakukan uji klinis, karena itu kesiapan

mereka lakukan sampai bulan Desember ini, bahkan kerja sama dengan berbagai universitas hingga lembaga internasional untuk sesegera mungkin bisa merapkan vaksin ini dan bisa segera di produksi di tahun 2021, dan harapan kami mudah-mudahan kita bisa segera bangkit di tahun depan karena kalau vaksin sudah ditemukan maka kepercayaan orang untuk bekerja kembali akan timbul,” imbuh Demer, sapaan akrab Gde Sumarjaya.

Berbagai dukungan baik dalam bentuk legislasi maupun dukungan anggaran, diakui Demer, akan terus diberikan. “Anggaran sudah bertriliun-triliun, lebih dari Rp 150 triliun keluar untuk kesehatan saja, dari anggaran tersebut kami ingin pastikan apakah benar-benar siap melakukan risetnya, memproduksi PCR-nya, jadi laporannya tidak hanya *window dressing*,” papar legislator daerah pemilihan Bali itu.

Sejumlah kendala yang dihadapi Bio Farma, ungkap Demer, salah satunya yakni macetnya pembayaran utang oleh rumah sakit. “Kemarin

mereka sudah meminta persetujuan untuk mendapatkan utang-utang yang belum dibayarkan dari hampir 30 rumah sakit karena persoalan BPJS. Kemarin Menteri Keuangan juga sudah memberikan, sehingga tentu mereka bisa berinvestasi, yang kita harapkan investasinya ditujukan untuk penanganan Covid-19 dalam waktu dekat ini,” ungkap Demer.

Menyampaikan komitmennya mengatasi pandemi Covid-19, Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan anggota BUMN Farmasi lainnya, yakni Kimia Farma dan Indofarma untuk menyediakan obat yang sudah masuk protap Pemerintah seperti Osetsmivir, Cloroquin, Hydrochloroquine, Avigan, Vitamin C, serta sejumlah antibiotik. Mei lalu, Bio Farma juga sudah memproduksi 100.000 *test kit Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) yang telah diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan merk BioCov-19 dan sudah diedarkan per Juni 2020. ■ *atw/sf*



Tim Kunspek Komisi VI DPR RI bertukar cenderamata dengan Direksi PT. Bio Farma (Persero). Foto: Alif/MAN

Komisi VII-Dubes Uni Eropa Bahas *Renewable Energy*



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto bertukar cenderamata dengan Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Piket. Foto: Azka/MAN

Komisi VII DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Piket. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menjelaskan, pada pertemuan itu kedua belah pihak fokus membahas *renewable energy* atau Energi Baru Terbarukan (EBT). Mengingat, berbagai pengalaman Uni Eropa diakui paling maju dalam segi pengembangan *renewable energy*.

Hal tersebut disampaikan Sugeng usai pertemuan di Ruang Pimpinan Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/7). Turut hadir, jajaran Pimpinan Komisi Energi, yaitu Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin (F-Golkar) dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno (F-PAN).

“Kami bersama Dubes UE fokus membahas *renewable energy*. Nah itulah, pengalaman UE sudah barang tentu bagus bagi kita Indonesia. Terlebih, bagi Komisi VII DPR RI yang sedang mau menyusun Undang-Undang EBT yang ditargetkan selesai Oktober 2020 ini. Dalam RUEN (Rencana Umum Energi Nasional), jelas sampai tahun 2025 kita menginginkan 23 persen sumber energi kita adalah dari EBT,” ujar Sugeng.

Terkait hal itu, politisi Fraksi Partai NasDem ini mengungkapkan, Komisi VII DPR RI lantas mengajukan sebuah usulan pembentukan suatu komite bersama yakni Komite *Renewable Energy* antara Indonesia dengan UE. Usulan tersebut, tutur Sugeng,

mendapat sambutan positif dari Dubes UE. Jadi, jelasnya, secara teknis seluruh *stakeholder* dilibatkan dalam komite bersama tersebut.

“Seluruh *stakeholder* nantinya terlibat baik unsur DPR, Pemerintah, swasta, dan pengusaha. Supaya, *renewable energy* betul-betul segera diimplementasikan di Indonesia. Berbagai pengalaman UE nanti bisa menjadi pelajaran kita, baik dari sisi teknologinya maupun dari sisi *financing*-nya. Sehingga, ujung dari segala ujung nantinya bagaimana mengadakan energi listrik yang murah, terjangkau dan *affordable*. Itu yang menjadi *concern* kita,” optimis legislator dapil Jawa Tengah VIII itu sembari menutup sesi wawancara. ■ pun/sf

BPJPH dan MUI Harus **Koordinasi** Keluarkan Sertifikasi Produk Halal

Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra mengingatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus terus berkoordinasi dalam mengeluarkan sertifikasi produk halal. Menurutnya, koordinasi ini dilaksanakan bukan hanya selama pandemi Covid-19, namun juga untuk masa seterusnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Nanang menilai saat ini BPJPH dan MUI tidak saling terkoordinasi satu sama lainnya sehingga menyebabkan kebingungan di tengah masyarakat mengenai jaminan sertifikasi produk halal yang dikeluarkan. "Saya lihat MUI ini belum ikhlas. Mereka menggugat agar sertifikasi halal dikembalikan ke mereka," papar Nanang saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan BPJPH Kemenag di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).

Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut menyampaikan, masyarakat juga kebingungan mengenai perbedaan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH dan MUI. "Kita saja bingung perbedaannya apa. Tidak ada yang jelas mengenai (sertifikasi) produk halal yang dikeluarkan oleh BPJPH maupun MUI," kritik Nanang.

Nanang mengaku, masyarakat pernah diresahkan oleh temuan daging haram yang dijual bebas di pasaran. Menurutnya hal

”

PERNAH WAKTU ITU ADA TEMUAN DAGING HARAM YANG BEREDAR LUAS DI PASARAN. WALAUPUN BERITANYA BELUM TENTU BENAR, INI KAN BUKTI KINERJANYA (KEDUA LEMBAGA INI) TIDAK BEGITU MAKSIMAL

tersebut sebagai bentuk BPJPH dan MUI yang tidak saling kerja sama dengan baik. "Pernah waktu itu ada temuan daging haram yang beredar luas di pasaran. Walaupun beritanya belum tentu benar, ini kan bukti kinerjanya (kedua lembaga ini) tidak begitu maksimal," tandas legislator dapil Nusa Tenggara Barat II ini. ■ tn/sf

Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra.
Foto: OjjiMAN



Kemenaker Diminta Siapkan Tenaga Kerja yang Dukung Proyek Prioritas Nasional

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker RI) untuk mempersiapkan tenaga kerja guna mendukung proyek-proyek prioritas nasional, proyek padat karya, wirausaha, dan tenaga kerja pendamping melalui lembaga pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah dan swasta.

“Kami meminta langkah strategis Pemerintah untuk mempersiapkan tenaga kerja guna mendukung proyek strategis nasional,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Rapat dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).

Sementara, dalam upaya pemulihan ekonomi, Ansory meminta jajaran Kemenaker lebih berorientasi pada perlindungan pekerja sektor informal dan perluasan kesempatan kerja. Komisi IX DPR RI juga mendesak Kemenaker untuk meningkatkan pelatihan vokasi bagi pekerja yang terdampak Covid-19 dalam program Kartu Prakerja dan program-program pelatihan yang lain di Kemenaker. Selain meningkatkan pelatihan, Kemenaker juga diminta membuat kebijakan dalam perlindungan pekerja.

“Salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 untuk melakukan PHK dan merumahkan pekerja. Serta meminta



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar. Foto: Arief/MAN

pengusaha tetap memberikan hak normatif pekerja sebagaimana ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS ini).

Untuk itu, lanjut Ansory, Kemenaker perlu melakukan koordinasi lintas instansi terkait pengawasan pelaksanaan relaksasi kebijakan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha sehingga tidak terjadi PHK bagi pekerja. “Membuat kebijakan percepatan penciptaan lapangan kerja berbasis UMKM serta mengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus Covid-19 di lingkungan kerja

dan melaksanakan perlindungan pengupahan,” kata Ansory.

Sementara untuk BPJS Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk membebaskan pajak pengambilan dana Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan juga didesak untuk melakukan terobosan kemudahan dalam memperoleh bantuan pembiayaan perumahan bagi peserta program JHT BPJS Ketenagakerjaan. “Sehingga memberikan kepastian atau jaminan bagi peserta program JHT BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat memiliki rumah,” tegas legislator dapil Sumut III itu. ■ rnm/sf

Revisi UU SKN untuk Tingkatkan Prestasi Semua Cabor

Komisi X DPR RI yang ingin merevisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) lewat Panja RUU SKN melihat, olahraga prestasi belum merata ke semua cabang olahraga (cabor). Untuk itu, revisi UU ini ditujukan bagi peningkatan cabor lain, selain yang sudah berprestasi seperti bulutangkis dan angkat besi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) secara virtual dengan pakar olahraga dan para atlet olahraga, Senin (13/7). Saat ini Komisi X DPR RI memang mengagendakan revisi UU SKN yang sudah diundangkan sejak tahun 2005 lalu. Selain untuk memajukan prestasi semua cabor, revisi UU ini juga untuk menjangkau masyarakat, dan menampung perkembangan dunia olahraga Tanah Air.

“Ada rencana kita akan merevisi UU SKN. Kenapa harus direvisi? UU SKN dibuat tahun 2005 di Komisi X. Saat itu, kita belum menduga ada perkembangan dunia olahraga. Tujuan utama UU ini untuk memperbaiki sistem keolahragaan kita. Namun, kenyataannya sejak 2005 sampai saat ini sudah berjalan 15 tahun justru olahraga kita tidak berkembang pesat. Hanya satu dua cabor yang tembus pada pasaran dunia,” ungkap Dede.

Hadir dalam rapat virtual itu, tokoh olahraga Joko Pekik yang juga dosen Universitas Negeri Yogyakarta sekaligus Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Yogyakarta. Hadir pula secara virtual legenda bulu tangkis nasional Susi Susanti, serta mantan pesepak

bola Bambang Pamungkas. Masih ditemukannya keluhan para atlet dan mantan atlet juga menjadi agenda pembahasan RUU SKN ini.

Kapasitas RUU SKN ini, lanjut politisi Partai Demokrat itu, ingin pula menjangkau masyarakat luas dengan tradisi hidup sehat. Selama ini, tutur Dede, Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang masyarakatnya kurang fit dan sehat. “Itu kenapa angka peserta dan pasien BPJS makin lama

makin meningkat, karena kurangnya olahraga di masyarakat atau kurang peran mengolahragakan masyarakat itu sendiri,” papar Dede lagi.

Dijelaskan legislator dapil Jawa Barat II tersebut, dunia olahraga sendiri terbagi dalam tiga kategori, yaitu olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan ke depan ada olahraga digital. Yang terakhir itu jadi perkembangan terbaru di dunia olahraga yang coba ingin dijangkau oleh Panja RUU SKN. ■ mh/sf

Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Dede Yusuf. Foto: Jaka/MAN



PT SMI Diminta **Prioritaskan** Dana Pinjaman bagi Daerah yang Lebih Membutuhkan

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari meminta Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Edwin Syahrudat beserta jajarannya untuk melakukan pengecekan kembali secara benar apakah bantuan pinjaman uang yang pernah diberikan SMI kepada Pemerintah Provinsi yang mengajukan pinjaman dana itu sudah sesuai dengan peruntukkan dan bagaimana implementasinya di lapangan.

Menurut Hatari, kalau memang penggunaan dana pinjaman itu terbukti tidak sesuai yang diharapkan, maka SMI sebaiknya mengalihkan dan memprioritaskan dana pinjaman tersebut untuk daerah-daerah lain yang lebih membutuhkan. Hal ini diungkapkan Hatari dalam Rapat dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Dirut PIP, LPDP, SMI, dan Dirut SMF terkait kinerja dan akuntabilitas keuangan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7).

”

**BANYAK PEMERINTAH
PROVINSI YANG
MENGELUH KARENA
SUDAH BERKALI-
KALI MENGAJUKAN
BANTUAN TETAPI
TIDAK PERNAH
DIBERIKAN**



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari. Foto: Arief/MAN

“Saya lihat di Manado dan Belitung sampai hari ini persoalan tanahnya masih belum selesai. Oleh karenanya harus dicek lagi bagaimana status tanahnya. Hak Ulayat, tingkat labilitas tanahnya itu bagaimana. Periode yang lalu kami pernah cek ke sana. Jalan belum berfungsi, apabila hujan dalam waktu dua jam, maka habis rata. Terkait persoalan tanahnya, saya pernah mengecek kepada Gubernur terkait, ternyata belum selesai,” ungkap politisi F-Nasdem itu.

Hatari menilai, PT SMI kerap bersikap diskriminatif. Ada daerah-daerah yang pernah diberi pinjaman dan macet dalam memenuhi kewajibannya tetapi tetap dimasukkan dalam daftar daerah yang menerima bantuan pinjaman uang.

Sementara itu, banyak daerah lain yang mengajukan bantuan

pinjaman dana guna mempercepat pembangunan didaerahnya justru tidak kunjung disetujui.

“Di Halmahera Selatan, Bupatiinya dengan pinjaman sebesar Rp 70 miliar dalam sepuluh tahun, ketika dia tidak menjadi Bupati kembali, ia meninggalkan outstanding-nya sejumlah Rp 38 miliar. Apa SMI sudah mengecek lagi. Apa kewajiban ini tidak perlu dipenuhi atau memang SMI yang menghibahkan kepada Kabupaten Halmahera Selatan,” papar legislator dapil Maluku Utara itu.

Dikatakannya, banyak pemerintah provinsi yang mengeluh karena sudah berkali-kali mengajukan bantuan tetapi tidak pernah diberikan. “Sementara ada daerah yang *ongkang-ongkang* kaki saja tetapi diberikan (bantuan). Hal ini harus menjadi catatan SMI,” tukas Hatari. ■ dep/es

Limbah Padat Harus Dikendalikan

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan, sebelum mencuatnya pandemi virus Corona (Covid-19), limbah padat telah menjadi masalah bagi lingkungan. Dan situasi ini kian memburuk selama pandemi Covid-19, karena limbah plastik yang berasal dari rumah tangga meningkat drastis seiring dengan kebijakan di rumah saja. Untuk itu, perlu kembali digalakkan program *zero waste* agar volume limbah bisa segera dikendalikan.

Hal ini ia dikemukakan saat mengikuti dialog virtual yang diselenggarakan oleh *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* dan *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)* dengan tema *Waste Management in the*

Context of Covid-19 Pandemic dari Ruang Pimpinan BKSAP Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/7). Selain Putu, hadir juga Anggota BKSAP DPR RI Dyah Roro Esti.

“Pengelolaan limbah padat yang tidak tepat tentu meningkatkan potensi penyebaran Covid-19. Beberapa provinsi dan kota di Indonesia, seperti Bali dan Jakarta, telah melarang penggunaan plastik. Hal ini sebagai sebuah komitmen untuk mewujudkan nol limbah (*zero waste*). Peraturan Gubernur Bali juga menambahkan adanya sanksi administrasi yang akan dikenakan kepada mereka yang tidak mematuhi larangan tersebut,” papar Putu pada sesi diskusi.

Terkait dengan fungsi pengawasan yang melekat pada parlemen, Putu menekankan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap tindakan dan

komitmen Pemerintah untuk mengelola limbah secara komprehensif dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Hal ini penting dilakukan guna memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan bagi masyarakat, dan keselamatan bagi lingkungan Hidup.

“Selain itu, kita harus memainkan peran yang lebih aktif dalam kemajuan proses penganggaran untuk membiayai pengelolaan limbah sebagai investasi dalam membangun sistem pengelolaan limbah yang efektif. Ini akan membantu negara mengatasi masalah kesehatan dan lingkungan, tidak hanya untuk periode pandemi, tetapi juga untuk masa depan,” terang politisi dapil Bali ini.

Selain menyadarkan masyarakat akan limbah, lanjut Putu, penting juga untuk membangkitkan kesadaran sektor bisnis tentang hierarki limbah menuju program *zero waste*. “Menge-nai penerapan hierarki limbah, ada serangkaian prosedur yang perlu dipertimbangkan yaitu pencegahan, persiapan untuk digunakan kembali, daur ulang, pemulihan dan pembuangan lainnya. Sektor bisnis dan swasta harus terlibat dalam setiap langkah ini,” pungkasnya. ■ es



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana didampingi Anggota BKSAP DPR RI Dyah Roro Esti mengikuti dialog virtual AIPA-ERIA. Foto: Andri/MAN



Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mengecek kesiapan Bandara Halim Perdanakusuma dalam menyambut *new normal*. Foto: Arief/MAN

Sambut *New Normal*, BURT DPR Cek Kesiapan Bandara Halim

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mengecek langsung kesiapan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dalam menyambut masa *new normal*, setelah sekian lama terdampak pandemi Covid-19. Kunjungan yang dipimpin Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso ini sekaligus melihat dari dekat protokol layanan kepada Anggota DPR RI.

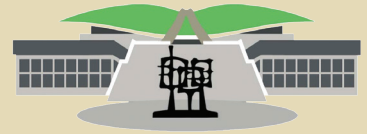
Delegasi BURT DPR ingin melihat otoritas bandara menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, terutama bagi para Anggota Dewan yang ingin mengakses transportasi udara. "Hari ini BURT melakukan kunjungan kerja ke Bandara Halim. Mengapa kita melakukan ini? Kita ingin mengecek kesiapan bandara dan protokol DPR RI di dalam memberikan pelayanan kepada para anggota sekarang," kata Agung, usai memimpin kunjungan di Bandara Halim, Jakarta Timur, Senin (13/7).

Pada Juli ini, Anggota Dewan sudah banyak yang mengakses bandara untuk kunjungan kerja dan bepergian ke luar kota. Bandara harus dipastikan aman dan sudah menjalankan protokol kesehatan Covid-19. BURT juga ingin mengetahui sejauhmana otoritas bandara, dalam hal ini Angkasa Pura II dalam menjalankan prosedur kesehatan bila ada calon penumpang pesawat yang diduga terpapar virus Covid-19.

"Kita tidak main-main dengan (virus) ini. Kita betul-betul melakukan protokol ini dengan baik dan ketat. Kalau tidak bisa berangkat, ya mohon maaf tidak boleh terbang, walaupun sudah membawa surat keterangan sehat. Tetapi ketika dicek di (bandara) sini suhunya tinggi, indikasinya kena Covid-19. Jadi, sortir dulu, dibawa ke rumah sakit terdekat di wilayah Halim untuk memberikan pernyataan," kata politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Lalu, bagaimana dengan tiket yang sudah dibeli penumpang bagi yang terindikasi Covid-19, lanjut Agung, maka tiketnya akan diberikan kepada calon penumpang berikutnya atau diganti uangnya berupa *voucher*. "Jadi kami berharap (calon) penumpang juga tidak ada yang dirugikan karena kita tidak ingin ada yang sakit. Kalau *pas* kita mau pergi ada gangguan kesehatan, mau tidak mau kita harus mengikuti protokol Covid-19 untuk menjaga semuanya," papar Agung.

Anggota Komisi II DPR RI itu menegaskan, ketika berada di bandara, semua calon penumpang harus mengikuti protokol kesehatan. Tak terkecuali bagi para Anggota Dewan. "Sekali lagi saya katakan, sebagai wakil rakyat seharusnya mengikuti aturan protokol Covid-19 dan jangan sampai tidak mau diperiksa, itu wajib untuk dilakukan pemeriksaan," pesan legislator dapil Jawa Barat I itu. ■ *afr/sf*



Pimpinan DPR RI menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 dari Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7). Foto: Kresno/MAN



Wakil Ketua DPR RI Korpolkam M. Azis Syamsuddin memimpin pergantian Wakil Ketua Baleg DPR RI dari Rieke Diah Pitaloka kepada Muhammad Nurdin di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/7). Foto: Jaka/MAN



Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyerahkan buku Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) kepada pejabat Kesetjeraan DPR RI saat laporan pelaksanaan RITIK di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7). Foto: Runi/Man

